

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Menurut Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2022, masyarakat yang berprofesi di bidang pertanian, kehutanan dan perikanan mencapai 40,64 juta jiwa yang menempati angka 29,96%¹ dari total pekerja aktif di Indonesia. Hal ini menandakan mayoritas profesi yang digeluti masyarakat Indonesia yaitu petani. Indonesia diberkahi dengan sumber daya alam yang melimpah dari sudut pandang geografis.

Lahan subur yang melimpah di Indonesia telah menjadikan negara ini sebagai negara yang didominasi agraris, dengan sebagian besar penduduknya mengandalkan pertanian sebagai alat penghidupan utama mereka. Kelangsungan pertanian tanah di Indonesia difasilitasi oleh kombinasi tanah subur dan iklim tropis. Beras memegang posisi yang menonjol di antara komoditas pertanian yang dibudidayakan oleh petani Indonesia, berfungsi sebagai makanan pokok yang mendasar dalam masyarakat Indonesia.

Upaya Indonesia untuk mencapai ketahanan pangan yang berkelanjutan sebagian besar berpusat pada pengelolaan beras yang efektif, yang dianggap sebagai produk pangan paling penting di negara ini. Implementasi berbagai intervensi oleh pemerintah di pasar beras domestik telah dilakukan untuk mengatasi masalah ekonomi dan politik.

Kebijakan ini telah menyebabkan pembatasan perdagangan internasional, serta stabilisasi harga dan promosi produksi. Namun demikian, munculnya perkembangan terakhir, termasuk perubahan kebijakan impor, kenaikan harga beras yang substansial, dan kekhawatiran

¹ “Sekitar 40 Juta Penduduk Indonesia Bekerja Di Sektor Pertanian Pada Februari 2022 | Databoks.” diakses melalui [https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/11/09/sekitar-40-juta-penduduk-indonesia-bekerja-di-sektor-pertanian-pada-februari-2022#:~:text=Menurut%20Badan%20Pusat%20Statistik%20\(BPS,dibanding%20lapangan%20pekerjaan%20utama%20lainnya.](https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/11/09/sekitar-40-juta-penduduk-indonesia-bekerja-di-sektor-pertanian-pada-februari-2022#:~:text=Menurut%20Badan%20Pusat%20Statistik%20(BPS,dibanding%20lapangan%20pekerjaan%20utama%20lainnya.)

akan kesejahteraan petani dalam negeri, telah mendorong perlunya meninjau kembali kebijakan beras yang ada di Indonesia. Pengembangan kebijakan beras yang sesuai sangat penting untuk mencapai dan mempertahankan ketahanan pangan secara berkelanjutan.

Berdasarkan data yang diberikan oleh Food and Agriculture Organization (FAO), beras merupakan komoditas pertanian yang penting di Indonesia. Pada tahun 2019, Indonesia menunjukkan keunggulannya sebagai produsen beras terkemuka dunia dengan mencapai hasil yang substansial sekitar 50,9 juta metrik ton. Selain itu, beras berfungsi sebagai komponen makanan pokok bagi sekitar 90% penduduk Indonesia, yang menegaskan pentingnya beras dalam kerangka ketahanan pangan negara.

Pemerintah Indonesia telah menempuh berbagai program yang bertujuan untuk mencapai swasembada produksi beras, dengan tujuan mengurangi impor beras dan meningkatkan produksi dalam negeri. Kebijakan tersebut di atas meliputi pemberian insentif dan dukungan kepada petani padi, investasi sistem irigasi, dan promosi penggunaan varietas padi unggul. Tujuan utamanya adalah untuk membangun penyediaan beras yang andal dan konsisten, sehingga melindungi bangsa dari kekurangan pangan.

Namun demikian, masih ada kendala yang perlu dibenahi, khususnya dalam mencari keseimbangan yang harmonis antara keharusan berdikari dengan pertimbangan kesejahteraan produsen pertanian dalam negeri dan konsekuensinya bagi perdagangan global. Kenaikan harga beras telah memicu diskusi tentang kemanjuran kebijakan yang ada dan dampaknya terhadap keterjangkauan konsumen dan ketahanan pangan di antara orang-orang yang terpinggirkan.

Untuk mengatasi kesulitan-kesulitan ini secara efektif dan membangun kerangka ketahanan pangan yang berkelanjutan, para pembuat kebijakan harus melakukan evaluasi komprehensif terhadap kebijakan beras. Ini memerlukan analisis kepentingan petani dan

konsumen, evaluasi efeknya pada pasar domestik dan internasional, dan memeriksa kemungkinan kolaborasi dan perdagangan regional.

Sehingga bangsa Indonesia dicirikan oleh kekayaan sumber daya alam yang signifikan, termasuk dataran yang subur dan iklim tropis. Akibatnya, berkembang menjadi masyarakat agraris di mana beras menempati posisi penting sebagai makanan pokok. Pencapaian ketahanan pangan yang berkelanjutan bergantung pada pengelolaan beras yang efektif, dimana pemerintah menggunakan banyak intervensi yang bertujuan untuk mencapai swasembada dan menstabilkan harga beras.

Namun demikian, kesulitan saat ini berupa kenaikan harga beras dan kekhawatiran terhadap kesejahteraan petani asli memerlukan penilaian ulang terhadap peraturan terkait beras yang ada. Penetapan kebijakan beras yang sesuai dan berkeadilan sangat penting untuk menjamin ketahanan pangan dan mendorong kemajuan pertanian berkelanjutan di Indonesia.²

Menurut Pasal 1 UU Nomor 18 Tahun 2012, penyelenggaraan pangan harus dilakukan secara adil, merata, dan berkelanjutan dengan mengutamakan prinsip kedaulatan, kemandirian, dan ketahanan pangan. Peraturan Pemerintah (PP) 17/2015 tentang ketahanan pangan menjelaskan ketahanan pangan sebagai kondisi di mana pangan tersedia dalam jumlah dan kualitas yang cukup, aman, beragam, bergizi, merata, dan terjangkau dari tingkat nasional ke tingkat individu.

Dengan kata lain, ketahanan pangan mencerminkan kemampuan untuk secara berkelanjutan dan merata memenuhi kebutuhan pangan setiap warga negara, sehingga setiap orang memiliki akses ke makanan. Berbagai strategi dan kebijakan digunakan untuk mencapai

² Patunru, dkk (2019) : *Political Economy of Rice Policy in Indonesia: A Perspective on the ASEAN Economic Opportunity, Discussion Paper, No. 6, Center for Indonesian Policy Studies (CIPS), Jakarta. Hlm 6-10*

ketahanan pangan, termasuk yang berkaitan dengan produksi, distribusi, dan penyediaan makanan kepada seluruh masyarakat³.

Menurut Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2015–2020, Indonesia menghadapi tiga masalah utama: ancaman terhadap otoritas negara, melemahnya sendi-sendi ekonomi nasional, peningkatan intoleransi, dan krisis kepribadian nasional. Salah satu masalah yang paling menonjol dalam melemahnya sendi-sendi ekonomi nasional adalah ketergantungan pada industri pangan.

Menurut laporan Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2017, rumah tangga termiskin menjadi yang paling terdampak oleh kenaikan harga beras. Ini karena sebagian besar penduduk Indonesia, terutama keluarga berpenghasilan rendah dan di daerah pedesaan, mengkonsumsi beras sebagai makanan pokok.

Fenomena ini tidak hanya terjadi di Indonesia tetapi juga di negara berkembang lainnya. Sebagai contoh, kenaikan tingkat kemiskinan 0,7% di Burkina Faso dikaitkan dengan harga beras tinggi, menunjukkan bahwa ketergantungan pada beras sebagai bahan makanan pokok dapat memiliki dampak sosial dan ekonomi yang signifikan pada masyarakat.

Dalam rencana pembangunan nasional, tindakan strategis diperlukan untuk mengatasi masalah ketergantungan pangan dan menghadapi fluktuasi harga beras. Untuk meningkatkan ketahanan pangan secara keseluruhan, RPJMN harus berusaha meningkatkan produksi pangan secara berkelanjutan, mengurangi ketergantungan pada impor beras, dan mengembangkan diversifikasi pangan. Langkah-langkah ini diharapkan dapat mengurangi dampak kenaikan harga beras terhadap masyarakat, terutama bagi masyarakat yang rentan ekonomi. Menurut studi yang dilakukan oleh Sayeed (2018) di Bangladesh, kenaikan harga beras sebesar 10%

³ “UU Nomor 18 tahun 2012 Pasal 1 tentang Pangan” [12uu018.pdf \(bphn.go.id\)](https://www.bphn.go.id/12uu018.pdf)

mengakibatkan penurunan pendapatan riil sebesar 54% untuk 50% populasi terbawah⁴. Selain itu, di Liberia, kenaikan harga pangan sebesar 10% berkontribusi pada peningkatan angka kemiskinan sebesar 2,2%.

Menurut Food and Agriculture Organization (FAO) Perserikatan Bangsa-Bangsa tahun 2006, ketahanan pangan mencakup empat dimensi penting, yaitu ketersediaan pangan, akses pangan, penggunaan pangan, dan stabilitas harga pangan. Keempat indikator tersebut mencakup berbagai aspek, antara lain penyediaan pangan, permintaan pangan, distribusi pangan, penggunaan pangan, dan upaya menjaga stabilitas harga komoditas pangan.

Berdasarkan definisi FAO tersebut, dapat disimpulkan bahwa ketahanan pangan menyangkut beberapa aspek penting, yaitu:

1. Kecukupan ketersediaan pangan: Aspek ini berkaitan dengan ketersediaan dan produksi pangan dalam jumlah yang cukup untuk memenuhi kebutuhan penduduk.
2. Keterjangkauan akses pangan: Aspek ini mencakup kemampuan penduduk untuk memperoleh dan membeli pangan dengan harga yang terjangkau.
3. Pemanfaatan pangan: Aspek ini berkaitan dengan bagaimana individu dan keluarga memanfaatkan pangan untuk memenuhi kebutuhan gizi dan kesehatannya.
4. Stabilitas harga pangan: Aspek ini berkaitan dengan stabilitas harga komoditas pangan untuk memitigasi fluktuasi harga yang dapat mempengaruhi ketahanan pangan di masyarakat.

Dengan mempertimbangkan keempat aspek tersebut, pemerintah dan instansi terkait dapat merumuskan kebijakan dan program yang komprehensif untuk meningkatkan ketahanan pangan di negara-negara yang menghadapi masalah harga pangan dan kemiskinan. Upaya ini

⁴ Sayeed, K. A. (2018). Rice prices and growth, and poverty reduction in Bangladesh. Rome: Food and Agriculture Organization of the United Nations. Diakses melalui <http://www.fao.org/3/I8332EN/i8332en.pdf>

diharapkan dapat membantu melindungi masyarakat rentan dan meningkatkan kesejahteraan secara keseluruhan..

Kenaikan harga beras di beberapa negara di Asia Tenggara telah terjadi sebagai dampak dari berbagai faktor, termasuk perubahan iklim, gangguan pasokan dan distribusi akibat pandemi COVID-19, serta aksi *panic buying* oleh konsumen. Contohnya, di Laos dan Thailand, harga beras naik sekitar 20% antara Januari dan April 2020⁵, terutama karena gangguan pasokan dan distribusi akibat pandemi COVID-19. Selain itu, aksi *panic buying* oleh konsumen juga berkontribusi pada kenaikan harga beras dan kekurangan pasokan di beberapa negara, seperti Australia.

Untuk memastikan pasokan beras yang aman, Indonesia mengimpor beras setiap tahunnya, dengan rata-rata lebih dari 1,2 juta ton beras diimpor setiap tahun antara tahun 1997 dan 2017. Perbedaan yang signifikan antara harga beras domestik dan internasional adalah salah satu alasan untuk praktik ini. Harga beras di Indonesia biasanya lebih tinggi⁶ daripada harga beras internasional. Ketidakstabilan harga ini terlihat dari semakin besarnya kesenjangan antara harga beras Indonesia dan internasional.

Harga beras di Indonesia meningkat setiap tahun dari 2009 hingga 2018, tetapi sejak pertengahan 2013 harga beras secara keseluruhan turun. Ketidakstabilan harga dan kerugian bagi konsumen dan petani disebabkan oleh tingginya fluktuasi harga di pasar beras Indonesia, terutama di wilayah yang kekurangan beras seperti Kepulauan Maluku dan Papua. Jumlah petani yang terlibat dalam semua komoditas pertanian pada tahun 2019 mencapai 34,58 juta, dan sekitar 33,4 juta pada tahun 2020, menurut data dari Badan Pusat Statistik. Dengan jumlah

⁵ ADB (2020). Covid-19 and Food Security in Southeast Asia. *International Journal of Sustainable Agricultural Management and Informatics*, 7(2), 90-110

⁶ Patunru,dkk (2019), "Political Economy of Rice Policy in Indonesia: *A Perspective on the ASEAN Economic Opportunity*", *Discussion Paper, No. 6, Center for Indonesian Policy Studies (CIPS)*, Jakarta.

penduduk Indonesia yang lebih dari 260 juta orang, menjadi lebih sulit untuk mencapai ketahanan pangan.

Melalui *ASEAN Integrated Food Security (AIFS)* dan *Special Program for Food Security (SPA-FS)* 2009, Indonesia bekerja sama dengan negara-negara anggota ASEAN untuk meningkatkan kebijakan ketahanan pangan nasional. Mengembangkan sistem cadangan makanan, mendorong perdagangan, menciptakan pasar makanan yang sehat, memperkuat koneksi dan integrasi sistem jaringan, dan mengumpulkan informasi tentang harga, distribusi, dan logistik adalah semua contoh kerja sama ini.

Indonesia adalah anggota aktif dari *ASEAN Food Security Council* dan *East Asia Emergency Rice Reserves*. Selain itu, negara ini membantu membangun Sistem Informasi Ketahanan Pangan ASEAN dan mendorong produksi pangan yang berkelanjutan. Indonesia berharap untuk meningkatkan kerjasama di bidang pertanian melalui kerjasama dengan AIFS dan SPA-FS 2009. Ini termasuk mendorong investasi pemerintah dalam produksi pangan, mendorong penelitian dan pengembangan bioteknologi, dan mendorong kemitraan dengan sektor swasta⁷.

Langkah-langkah ini dimaksudkan untuk meningkatkan ketahanan pangan Indonesia, meningkatkan kesejahteraan petani, dan menjaga harga beras stabil di dalam negeri. Kerangka Ketahanan Pangan Terintegrasi ASEAN (AIFS) telah diratifikasi pada KTT ASEAN ke-32 di Singapura pada April 2018, bertujuan untuk mempromosikan tujuan pembangunan berkelanjutan dan meningkatkan ketahanan pangan di kawasan ASEAN.

Kerangka kerja ini didasarkan pada prinsip-prinsip yang diakui secara internasional, termasuk hak atas pangan, keterlibatan aktif masyarakat, kerja sama regional dan internasional, pemanfaatan sumber daya alam secara berkelanjutan, dan ketahanan terhadap perubahan iklim.

⁷ Diakses melalui: <https://asean.org/wp-content/uploads/2020/11/42-AIFS-Framework-SPA-FS-Final-13-July-2020.pdf>

Tujuan utama AIFS adalah untuk meningkatkan ketersediaan, akses dan konsumsi pangan, sekaligus mengembangkan sistem pangan yang berkelanjutan dan inovatif.

Aspek kunci AIFS meliputi peningkatan produksi pangan melalui pembangunan pertanian berkelanjutan, pemanfaatan teknologi modern untuk produktivitas dan produksi pangan organik, peningkatan akses pangan melalui distribusi dan perdagangan yang efisien dan merata, penguatan ketahanan masyarakat terhadap bencana alam, konflik dan perubahan iklim, peningkatan kualitas pangan dan nilai gizi melalui industri pangan yang sehat dan inovatif, serta meningkatkan koordinasi regional untuk mengatasi masalah ketahanan pangan yang kompleks.

Data ketahanan pangan dan gizi di kawasan ASEAN sangat penting untuk menggalang efektivitas kerangka kerja AIFS dan dampaknya terhadap pencapaian tujuan ketahanan pangan. Berbagai laporan dan kajian oleh ASEAN, FAO dan organisasi internasional lainnya dapat memberikan wawasan yang berharga tentang kemajuan dan tantangan yang dihadapi dalam meningkatkan ketahanan pangan di kawasan ASEAN.

Pada tahun 2009 hingga 2020, ASEAN mengembangkan dan melaksanakan Kerangka Kerja Ketahanan Pangan Terpadu ASEAN (*ASEAN Integrated Food Security/AIFS*) bersama dengan dua Rencana Aksi Strategis Ketahanan Pangan. Inisiatif-inisiatif ini mencakup langkah-langkah untuk memastikan ketahanan pangan jangka panjang dan meningkatkan mata pencaharian petani di seluruh negara anggota ASEAN. Menjelang akhir tahun 2020, negara-negara anggota ASEAN sepakat untuk memperpanjang Kerangka Kerja AIFS dan SPA-FS, 2015-2020 hingga tahun 2025 untuk melanjutkan kerja sama mereka.

Kerangka Kerja AIFS dan SPA-FS yang baru, 2021-2025 akan fokus pada upaya untuk memastikan ketahanan pangan dan gizi jangka panjang sekaligus menciptakan lingkungan di mana negara-negara anggota ASEAN dapat berkolaborasi dalam berbagai aspek yang

berkaitan dengan produksi, pengolahan, dan perdagangan pangan. Kerangka kerja baru ini juga akan mendorong pertukaran informasi dan berbagi pengetahuan di antara berbagai pemangku kepentingan, mengidentifikasi strategi baru, serta memberikan panduan kepada kelompok dan mitra terkait untuk meningkatkan efisiensi dan kontribusi mereka dalam mempromosikan ketahanan pangan di ASEAN.

Menurut data dari Badan Pusat Statistik bahwa, produksi beras pada 2022 untuk konsumsi pangan penduduk mengalami kenaikan sebanyak 2,29 % dengan total sebanyak 718,03 ribu ton sedangkan produksi beras di tahun 2022 hanya 32,07 juta ton dan pada produksi beras di 2021 sebesar 31,36 juta ton⁸.

Gambar 1. Luas Panen dan Total Produksi Padi di Indonesia



Sumber: Katadata.co.id

Pada tahun 2022, pemerintah Indonesia menggunakan Bulog untuk memperoleh beras dari Vietnam dan Thailand sebagai bagian dari kerangka kerja sama pemerintah-ke-pemerintah (G to G) dalam menanggapi kekurangan cadangan beras pemerintah (CBP). Untuk mengisi cadangan beras pemerintah (CBP) pemerintah secara bertahap, Bulog membeli 5.000 ton beras dari Vietnam. Hingga Desember 2022, total beras yang diimpor mencapai 200.000 ton.

⁸ Badan Pusat Statistik, “Informasi Luas Panen Padi”, diakses melalui: <https://www.bps.go.id/pressrelease/2022/10/17/1910/pada-2022--luas-panen-padi-diperkirakan-sebesar-10-61-juta-hektare-dengan-produksi-sekitar-55-67-juta-ton-gkg.html#:~:text=Produksi%20beras%20pada%202022%20untuk,sebesar%2031%2C36%20juta%20to>

Menurut data, biaya produksi beras Indonesia lebih besar dari Vietnam. Antara awal tahun 2014 hingga triwulan kedua tahun 2019, tahun dengan impor beras tertinggi sebesar 2,2 juta ton adalah tahun 2018. Di Vietnam, harganya mencapai Rp. 1.679 untuk menghasilkan 1 kg beras, dibandingkan dengan Rp. 4.079 di Indonesia, menunjukkan bahwa biaya produksi beras di Indonesia lebih tinggi.

Hubungan kerja sama antara Indonesia dan Vietnam sudah terlaksana selama 60 tahun, atas kesadaran kedua belah pihak negara meyakini bahwa dengan menjalin kerja sama perlu berkontribusi secara aktif dalam menjaga perdamaian, stabilitas dan keamanan yang dimana untuk membangun komitmen 5 antara kedua belah pihak dipengaruhi terhadap kerja sama pembangunan berkelanjutan masing-masing negara yang telah ditetapkan oleh founding fathers dari masing-masing negara yaitu Presiden Soekarno dan Presiden Ho Chi Minh⁹.

Gambar 2 Impor Beras 2015-2021

| Negara Asal | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|-----------------------|------------------|--------------------|------------------|--------------------|------------------|------------------|------------------|
| Berat Bersih : Ton | | | | | | | |
| India | 34 167,5 | 36 142,0 | 32 209,7 | 337 999,0 | 7 973,3 | 10 594,4 | 215 386,5 |
| Thailand | 126 745,7 | 557 890,0 | 108 944,8 | 795 600,1 | 53 278,0 | 88 593,1 | 69 360,0 |
| Vietnam | 509 374,2 | 535 577,0 | 16 599,9 | 767 180,9 | 33 133,1 | 88 716,4 | 65 692,9 |
| Pakistan | 180 099,5 | 134 832,5 | 87 500,0 | 310 990,0 | 182 564,9 | 110 516,5 | 52 479,0 |
| Myanmar | 8 775,0 | 16 650,0 | 57 475,0 | 41 820,0 | 166 700,6 | 57 841,4 | 3 790,0 |
| Jepang | | | 72,1 | 0,2 | 90,0 | 0,3 | 230,3 |
| Tionggok ¹ | 479,9 | 1 271,9 | 2 419,0 | 227,7 | 24,3 | 23,8 | 42,6 |
| Lainnya | 1 959,2 | 815,1 | 54,3 | 6,5 | 744,6 | 0,3 | 760,1 |
| Jumlah | 861 601,0 | 1 283 178,5 | 305 274,8 | 2 253 824,4 | 444 508,8 | 356 286,2 | 407 741,4 |

Sumber: Badan Pusat Statistik

⁹ DPR. "Strategic Pairing Indonesia Dan Vietnam". Diakses melalui <http://www.dpr.go.id/doksileg/proses5/RJ5-20160201-101742-5967.pdf>

Keterangan: Impor beras ke Indonesia sangat bervariasi antara tahun 2017 dan 2018, menurut data. Sementara impor beras meningkat signifikan pada tahun 2018, hampir mencapai 624%, pada tahun 2017 menurun signifikan pada tahun 2018, mendekati 75%. Variasi tersebut menunjukkan bahwa produksi beras lokal di Indonesia tidak cukup untuk memenuhi permintaan beras selama ini.

Alhasil, untuk mengatasi kelangkaan beras dalam negeri, pemerintah Indonesia beralih mengimpor beras dari Vietnam. Keputusan pemerintah mengimpor beras dari Vietnam dilakukan sebagai upaya untuk menutupi kekurangan gabah. Untuk memenuhi kebutuhan beras Indonesia, beras impor dipilih secara cermat berdasarkan kualitas dan diberikan dengan harga yang bersaing. Langkah ini dilakukan sebagai respons terhadap perubahan produksi beras dalam negeri guna menjamin ketahanan pangan dan menstabilkan pasar beras dalam negeri.

Demikian, terkait dengan latar belakang masalah yang telah dijelaskan secara terperinci, penulis tertarik melakukan penelitian mengenai kebijakan impor beras dengan judul “Kerjasama Ketahanan Pangan Indonesia – ASEAN Melalui Kerangka ASEAN INTEGRATED FOOD SECURITY Studi Kasus: Kebijakan Impor beras dari Vietnam periode 2018-2022”.

1.2 Rumusan Masalah

Dengan terdapatnya suatu kebijakan impor beras yang berimplikasi terhadap penurunan pendapatan para petani, maka hal itu dapat diasumsikan sebagai ancaman bagi para masyarakat yang berprofesi sebagai petani. Tidak dapat dipungkiri bahwa hal ini pun menimbulkan adanya aktor yang pro maupun kontra dalam memberlakukan kebijakan impor beras. Sebab masyarakat selalu ingin mendapatkan harga pangan yang sangat terjangkau sedangkan petani juga ingin mendapatkan keuntungan dari hasil penjualan.

Alhasil, harga beras Petani di Indonesia cenderung lebih mahal disbanding harga beras Internasional¹⁰. Beras adalah salah satu komoditas utama yang sangat mempengaruhi inflasi di Indonesia karena berbagai kebijakan mengenai stabilitas harga beras terus dibuat pemerintah untuk sama-sama menguntungkan petani dan konsumen seperti yang sudah disebutkan sebelumnya.

Kebijakan perberasan di Indonesia terdapat empat bagian yaitu kebijakan produksi, kebijakan harga, kebijakan distribusi dan kebijakan impor. Badan Ketahanan Nasional berupaya agar Indonesia dapat menjadi negara yang mampu menjamin setiap masyarakatnya mendapatkan keseterediaan dan aksesibilitas pangan yang memadai. Dalam hal ini, rumusan masalah pokok untuk proposal skripsi Hubungan Internasional dengan judul "Analisis Food Security Indonesia melalui Kebijakan Impor Beras dari Vietnam 2018-2022" mungkin dapat diformulasikan sebagai berikut:

"Bagaimana pengaruh Indonesia untuk menekan impor beras dari Vietnam Melalui Kerangka AIFS?"

Dengan rumusan masalah pokok ini, peneliti dapat fokus pada analisis implementasi kebijakan impor beras dari Vietnam dan dampaknya terhadap food security di Indonesia selama periode tersebut.

1.2 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis bagaimana ketahanan pangan Indonesia dalam kerangka AIFS pengaruh kebijakan impor beras dari Vietnam terhadap food security di Indonesia selama periode 2018-2022.

¹⁰ Desi Aryani (2021) "Rice Price Control Instrument in Indonesia: Effective Time Required" Universitas Sriwijaya, Sumatera Selatan, Indonesia.

1.3 Batasan Masalah

Penelitian ini hanya akan membahas tentang kebijakan impor beras dari Vietnam dan pengaruhnya terhadap food security di Indonesia serta tinjauan dari ekonomi politik internasional, dan tidak akan membahas masalah-masalah lain yang berkaitan dengan pangan dan gizi.

